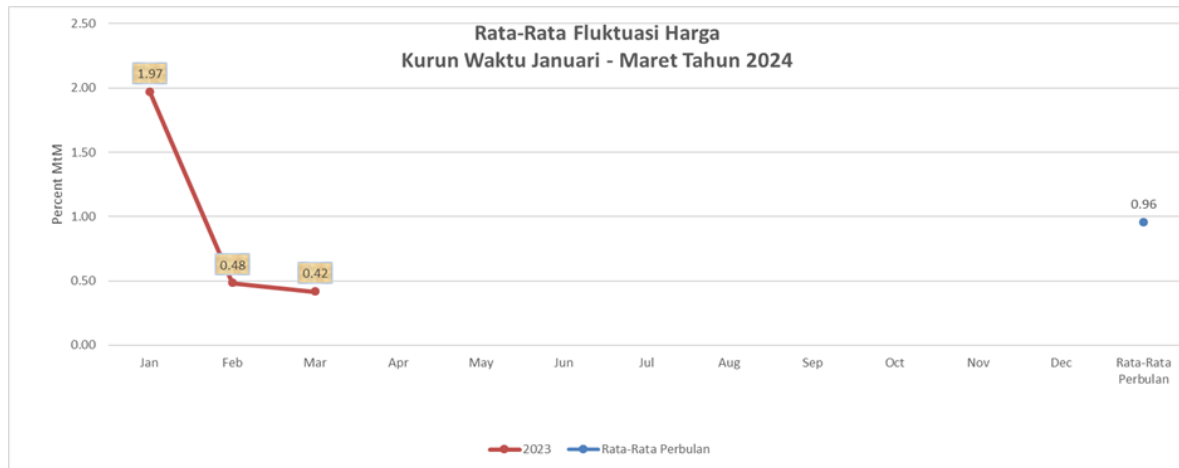


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk daerah yang melakukan pemantauan dan perhitungan Indeks Perkembangan Harga (IPH). IPH adalah indeks yang mengukur perubahan harga-harga komoditas pangan yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Daerah Kepulauan Anambas dapat melakukan pemantauan perkembangan Harga dan Stok dalam kurun waktu rerata per-triwulanan. Berikut ini adalah 22 komoditas pangan (*volatile foods*) Kabupaten Kepulauan Anambas yang dipantau, diantaranya :

1. Beras;
2. Kedelai;
3. varian Cabe;
4. Bawang Merah;
5. Bawang Putih;
6. Gula Pasir;
7. Minyak Goreng;
8. Tepung Terigu;
9. Daging Sapi;
10. Daging Ayam;
11. Telur;
12. Ikan Teri;
13. Susu Kental Manis;
14. Garam Halus;
15. Kacang Hijau;
16. Kacang Tanah;
17. Mie Instant;
18. Bawang Bombay;
19. Tahu;
20. Tempe;
21. Pisang Ambon; dan
22. Jeruk Kalimantan.

Perkembangan Harga *Calendar to Calendar (CtC) volatile foods* di Kabupaten Kepulauan Anambas pada Triwulan I Tahun 2024 berada angka rata-rata fluktuasi 0,96%. Jika target Fluktuasi Tahunan sebesar 0,53%, maka angka *CtC* ini lebih tinggi dari target fluktuasi sebesar 0,43%. Namun situasi perekonomian di masih terpantau aman dan kondusif. Berikut merupakan grafik IPH 22 komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (Bapokting) yang dipantau di Kabupaten Kepulauan Anambas, yakni:



Dengan adanya pemantauan IPH, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga-harga pangan. IPH juga dapat menjadi salah satu indikator kesejahteraan masyarakat, karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. IPH juga dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan makroekonomi yang berdampak pada inflasi.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

1. Letak Geografis

Kepulauan Anambas merupakan daerah kepulauan dengan cakupan $\pm 98\%$ terdiri dari perairan dan hanya $\pm 2\%$ daratan, terdiri dari 255 pulau yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berdasarkan data moda transportasi laut yang berlayar di perairan Anambas dari Instansi Syahbandar Tarempa tahun lalu, Kepulauan Anambas masih melakukan distribusi logistik dari daerah/kota luar ($\pm 90\%$ dari kabupaten/kota terdekat). Anambas bukan merupakan daerah surplus bahan pokok dan barang penting, khususnya pada komoditas kebutuhan-kebutuhan pokok (sembako). Pada sektor ketahanan pangan, Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan masih menemukan kendala aktual di lapangan, minat masyarakat Anambas akan bertani dan bercocok tanam dinilai sangat kurang. Hal ini bisa dilihat dari perspektif sosial budaya yang ditunjukkan dengan kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat Anambas bermukim dan tinggal di daerah pesisir dan sebagian besar masyarakat Anambas bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi cuaca ekstrim juga memberikan dampak negatif terhadap hasil produksi pertanian lokal.

2. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana penunjang distribusi masih tergolong belum memadai, hal ini disebabkan karena sistem bongkar muat barang (*dwelling time*) terbesar di Pusat Kota Tarempa masih belum terurai dengan baik. Hal ini memberikan efek domino yang berpotensi mengakibatkan lambatnya penanganan aktifitas bongkar muat. Waktu tunggu aktifitas bongkar muat rata-rata memakan waktu mencapai 14 hari kalender. Penyebab utama lamanya waktu bongkar muat ini disebabkan karena:

- Keterbatasan Tenaga kerja Bongkar Muat;
- Di Lokasi Pelabuhan Tarempa masih belum memiliki sarana pergudangan;
- Jalur Distribusi dalam kota yang sangat sempit dan memakan waktu lama untuk bongkar muat dengan volume sekitar 1m^3 (menggunakan moda transportasi kendaraan Roda 3);
- Belum dimanfaatkannya Gudang logistik sebagai sarana untuk memperlancar distribusi; dan
- Belum selesainya Pembangunan Pelabuhan Gudang Logistik Teluk Ret.

3. Optimalisasi Program Unggulan

Adapun hasil rapat koordinasi Tim Penanganan Inflasi Daerah Triwulan I Tahun 2024, yakni:

- Pengendalian Inflasi di Kab. Kep. Anambas difokuskan pada program ketahanan pangan;
- Program Unggulan TPID Tahun 2023 dengan Tema Gerakan Menanam Aneka Hortikultura (GEMAH ANAMBAS) diputuskan kembali menjadi program unggulan TPID pada Tahun 2024;
- Inspektorat Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan rutin dengan melakukan permintaan data dukung terhadap semua perangkat daerah yang tergabung dalam TPID.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan arahan Sekretaris Daerah selaku Pelaksana Harian TPID, berikut ini merupakan arahan pasca Rakor *High Level Meeting* (HLM) Triwulan I Tahun 2024, yakni:

1. Optimalisasi kegiatan pemantauan harga dan stok barang di Kabupaten Kepulauan Anambas agar semakin komprehensif dan integratif;
2. Optimalisasi koordinasi setiap perangkat daerah agar memiliki informasi data dukung tentang kegiatan/program yang berhubungan dengan Pengendalian Inflasi di daerah, data dan informasi tersebut merupakan data dukung yang disampaikan kepada Inspektorat Daerah dalam melakukan pelaporan penanganan inflasi Kabupaten Kepulauan Anambas ke Kementerian Dalam Negeri RI;
3. Optimalisasi Program Unggulan TPID dengan lebih terencana dan terintegrasi agar dapat masuk dalam daftar daerah yang berpotensi memenangkan Penghargaan TPID Award Tahun 2024;
4. Optimalisasi pengawalan rencana pembangunan sarana dan prasarana strategis maupun potensial seperti pelabuhan di beberapa titik agar dapat terhubung dengan 3 pulau besar di Anambas (Siantan, Jemaja, dan Palmatak) sebagai upaya pemerataan pertumbuhan ekonomi di Anambas;
5. Optimalisasi peranan Diskominfotik Kabupaten Kepulauan Anambas untuk bersinergi dengan daerah surplus pangan potensial;

Optimalisasi peranan BUMDES dalam mengumpulkan informasi dan data dukung terkait jumlah BUMDES aktif dan non-aktif, serta melakukan kajian mendalam tentang Anggaran Dana Desa.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berikut ini merupakan pemaparan hasil riviú Pengendalian Inflasi Daerah melalui Surat Kemendagri RI Nomor 500.2.5/527/SJ, tanggal 26 Januari 2024 Perihal Monitoring dan Evaluasi Penanganan Inflasi Daerah Tahun 2024, didapati informasi bahwa Kabupaten Kepulauan Anambas termasuk :

1. 191 Pemerintah Daerah dengan Nilai IPH di atas 3% lebih dari 1-5 kali;
2. 488 Pemerintah Daerah yang melakukan upaya pelaporan Gerakan Pasar Murah (GPM) Tahun 2023 (Tanggal 8-9 April 2023), serta
3. 147 Pemerintah Daerah yang melaksanakan Gerakan Menanam Cabai, namun *output* kegiatan belum terdokumentasi sehingga tidak dapat diterbitkan sebagai laporan Pemerintah Daerah yang sudah melakukan upaya penanganan inflasi di daerah khususnya Kabupaten Kepulauan Anambas.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 277 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 513 Tahun 2022 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 514 Tahun 2022 tentang Peta Jalan (*Road Map*) Pengendalian Inflasi Daerah yang disusun dalam 4 kunci strategis (*4 Key Strategies*) yaitu :

1. Keterjangkauan Harga dan Ketersediaan Stok

TPID berupaya untuk tetap melakukan analisa sumber atau potensi tekanan harga dan stok barang, memastikan ketersediaan informasi harga dan stok di Kabupaten Kepulauan Anambas. Inspektorat Daerah dan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah secara konsisten mengikuti pertemuan rutin Rapat Koordinasi Wilayah TPID Kabupaten, Provinsi, maupun Rapat Koordinasi TPID skala Nasional dan secara rutin. TPID melaksanakan fungsi koordinatif melalui Bagian Perekonomian SDA dan Inspektorat Daerah untuk mendapatkan seluruh potensi data dukung, informasi kegiatan/program penanganan yang berkaitan dengan TPID agar dapat dijadikan sebagai laporan kepada Kementerian dan/atau Instansi terkait.

2. Ketersediaan Pasokan/Produk

TPID secara sinergis berupaya menjaga kestabilan dan ketersediaan barang pokok dan barang penting yang beredar. Penyediaan diseminasi data integratif sektoral meliputi stok Bapokting daerah oleh Perangkat Daerah terkait, serta memberikan pelaporan rutin dan berkala terkait capaian program kerja inflasi daerah rutin kepada Inspektorat Daerah dan Sekretariat TPID.

3. Kelancaran Distribusi

TPID secara berkesinambungan tetap mengawal program **“Peningkatan Sistem Logistik secara Terintegrasi pengalihan lokus Pelabuhan ke Area Logistik Teluk Ret”**. Pengalihan dilakukan secara parsial dengan penggunaan logistik dan pemanfaatan sisi Pelabuhan Teluk Ret untuk transportasi antar pulau. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat memaksimalkan perannya dalam memberikan pembinaan yang lebih intensif dengan penyertaan modal dana desa, pendampingan pelatihan pengelolaan keuangan yang berbasis aplikasi serta mendorong perencanaan bantuan stimulus fiskal untuk BUMDES yang dinilai berhasil dan layak dalam operasional BUMDES.

4. Komunikasi Efektif

TPID mengikuti Rapat Koordinasi arahan Pemerintah Pusat yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan diikuti oleh seluruh Kepala Perangkat Daerah dan/atau Badan/Kantor Pengampu Program TPID. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas dapat berperan dalam segi publikasi dan koordinasi dengan daerah potensial surplus pangan.